



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/361/2020
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, perlu menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan 44 (empat puluh empat) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rancangan undang-undang, mengikuti program legislasi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan peraturan pemerintah dan program penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum dan Organisasi melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2020 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

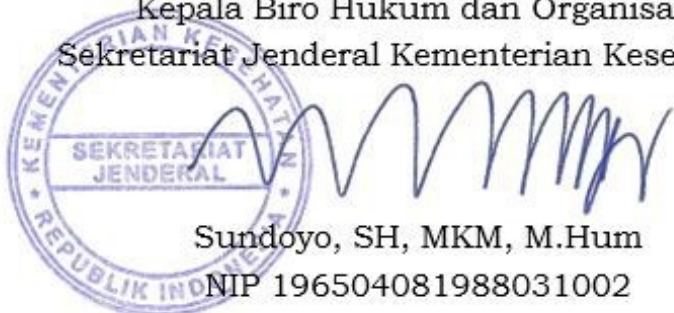
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/361/2020
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RUU tentang Wabah	1. Penetapan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah. 2. Kewaspadaan dini wabah. 3. Penetapan daerah terjangkit KLB dan kegiatan penanggulangannya. 4. Penetapan daerah terjangkit wabah dan kegiatan penanggulangannya.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

B. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	1. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. 2. Tindakan keekarantinaan kesehatan. 3. Keekarantinaan kesehatan di pintu masuk. 4. Keekarantinaan kesehatan di wilayah. 5. Penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. 6. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi nakhoda, kapten penerbang, dan pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat. 7. Sumber daya. 8. Peran serta masyarakat.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
3	RPP tentang Perubahan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif	1. Gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau 2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau 3. Larangan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Amanah Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
4	RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Layanan Primer	1. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan termasuk penempatan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. 2. Pendanaan bagi dokter layanan primer melalui pemberian insentif. 3. Pembinaan dan pengawasan termasuk kesinambungan penyelenggaraan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan pertama.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	
5	RPerpres tentang Kementerian Kesehatan	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi unit Eselon I di Kementerian Kesehatan	Sekretariat Jenderal	
6	RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	1. Konsep Kelas Perawatan Standar 2. Manfaat Kebutuhan Dasar 3. Single Tarif 4. Perubahan Iuran	Sekretariat Jenderal	

D. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
7	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik Tahun 2021	Mekanisme perencanaan, penganggaran, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, dan pelaporan.	Sekretariat Jenderal	Amanah Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
8	RPermenkes tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik	Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, dan Jenis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Sekretariat Jenderal	Amanah Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019.
9	RPermenkes tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun 2021	Manajemen Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 dan Ruang Lingkup Kegiatan Dana Dekonsentrasi, serta Pagu Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan.	Sekretariat Jenderal	Amanah Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10	RPermenkes tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring dan Evaluasi	1. Tata cara perencanaan 2. Tata cara Penganggaran 3. Tata cara Monev 4. Tata cara Pelaporan	Sekretariat Jenderal	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan 48 Tahun 2017 tentang pedoman perencanaan dan penganggaran bidang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Bidang Kesehatan			kesehatan.
11	RPermenkes tentang Seleksi Terbuka bagi JPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Tata cara mengikuti seleksi terbuka bagi JPT 2. Persyaratan mengikuti seleksi terbuka bagi JPT 3. Tim seleksi	Sekretariat Jenderal	
12	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	Organisasi tugas, fungsi, dan tata kerja seluruh satuan kerja di lingkungan kementerian kesehatan	Sekretariat Jenderal	
13	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Elektronik	1. Pечatatan pelayanan kesehatan berbasis elektronik 2. Penerapan regulatory sandbox 3. Pendaftaran pelayanan kesehatan berbasis elektronik 4. Monitoring dan evaluasi	Sekretariat Jenderal	
14	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan	1. Tujuan dan ruang lingkup 2. Kewajiban serta kewenangan 3. Pelaksanaan satu data 4. Prinsip pengelolaan data dan teknologi	Sekretariat Jenderal	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		informasi 5. Indikator/muatan data pada aplikasi satu data 6. Pengorganisasian 7. Sarana dan prasarana 8. Keamanan dan informasi 9. Pembinaan dan pengawasan		
15	RPermenkes Pedoman Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Bentuk kerjasama dengan mitra asing 2. Persyaratan dalam menjalin kerjasama dengan mitra asing 3. Tahapan/proses dalam menyusun perjanjian internasional 4. Kerangka perjanjian kerjasama dengan mitra asing 5. Implementasi, monitoring dan evaluasi kerjasama dengan mitra asing 10. Hal yang diperhatikan dalam menjalin kerja sama dengan mitra asing	Biro Kerja Sama Luar Negeri	
16	RPermenkes tentang Tata	Tahapan pelaksanaan pengawasan kualitas air	Direktorat	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM)	minum (PKAM) dan kewenangan institusi yang terkait dengan PKAM.	Jenderal Kesehatan Masyarakat	
17	RPermenkes tentang Upaya Kesehatan Olahraga	1. Konsep Kesehatan Olahraga 2. Penyelenggaraan kesehatan Olahraga 3. Peran pemerintah dalam kesehatan olahraga 4. Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan olahraga 5. Penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga 6. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
18	RPermenkes tentang Donor ASI	1. Pendonor dan Penerima ASI 2. Tata Cara Menjadi Pendonor ASI Dan Penerima Donor ASI 3. Unit Donor ASI dan Bank ASI 4. Penyelenggaraan Donor ASI 5. Pembinaan dan Pengawasan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
19	RPermenkes tentang	1. Penetapan Standar Baku Mutu Kesehatan	Direktorat	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Tanah	Lingkungan untuk media tanah yang akan dimanfaatkan. 2. Persyaratan kesehatan media tanah. 3. Pemulihan untuk lahan atau tanah yang akan dipergunakan. 4. Pengawasan dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah.	Jenderal Kesehatan Masyarakat	
20	RPermenkes tentang Penanggulangan Malaria	1. Penyelenggaraan penanggulangan malaria (penemuan penderita, diagnosis, dan tata laksana kasus). 2. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Sumber daya. 4. Koordinasi. 5. Jejaring kerja dan kemitraan. 6. Peran serta masyarakat. 7. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
21	RPermenkes tentang Penanggulangan	1. Penyelenggaraan penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran	Direktorat Jenderal	Amanah Pasal 96 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Gangguan Penglihatan dan Pendengaran	2. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Sumber daya 4. Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan 5. Peran serta masyarakat 6. Pembinaan dan pengawasan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	tentang Kesehatan
22	RPermenkes tentang Pedoman Terapi Rumatan Metadona	1. Pelayanan Terapi Rumatan Metadona 2. Pengadaan Metadona 3. Peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan metadona 4. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Pencatatan dan pelaporan 6. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadona
23	RPermenkes tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional	1. Organisasi sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. 2. Tata cara pembentukan sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Tugas dan fungsi sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. 4. Penapisan dan penilaian metode pelayanan kesehatan tradisional.		
24	RPermenkes tentang Pedoman Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di FKTP	1. Merupakan acuan bagi FKTP dalam mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten dalam yankes di FKTP. 2. Penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba di FKTP yang mengatur pembentukan tim pelaksana/tenaga penanggung jawab program, evaluasi pelaksanaan program, indikator mutu, dan pelaporan program. 3. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	
25	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan Perkesmas 2. Pelayanan Perkesmas terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	(Perkesmas)			Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.
26	RPermenkes tentang Klinik	1. Persyaratan Klinik, meliputi sumber daya klinik, termasuk obat-obatan di klinik. 2. Perizinan Klinik. 3. Tugas dan tanggung jawab klinik. 4. Penyelenggaraan Klinik PMA 5. Pembinaan dan pengawasan. 6. Lampiran baik klinik utama dan pratama.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
27	RPermenkes tentang Rekam Medik	1. Jenis rekam medik. a. Rekam medis manual. b. Rekam medis elektronik. 2. Penyelenggaraan rekam medis. a. Isi dan format rekam medis. b. SDM. c. Penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan. d. Kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Rekam medis terintegrasi. a. Ruang lingkup rekam medik. b. Penyelenggaraan rekam medik terintegrasi. c. Aplikasi rekam medik integrasi. d. Isi rekam medik integrasi. e. Privasi, keamanan, dan kerahasiaan. f. Otorisasi dan hak akses. g. Aspek legalitas. 4. Pembinaan dan pengawasan. 5. Pengaturan integrasi rekam medik dalam kaitannya dengan sistem rujukan.		
28	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	Pengaturan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP).	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
29	RPermenkes tentang Pedoman Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan di	Instrumen penilaian evaluasi mutu pelayanan di rumah sakit dari pendaftaran sampai dengan standar pelayanan yang dilaksanakan	Direktorat Jenderal Pelayanan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan.	Kesehatan	
30	RPermenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Klinik Utama	1. Merupakan perubahan kedua dari Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 terutama terkait dengan regulasi yang ada di dalam permenkes serta lampiran standar dan instrumen yang berupa standar akreditasi FKTP. 2. Sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan akreditasi FKTP. 3. Dalam rangka mengakomodir dan menyesuaikan perubahan regulasi dan kemajuan iptek dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan primer.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
31	RPermenkes tentang Pelayanan Gizi di Rumah Sakit	1. Pelayanan Gizi 2. Penyelenggaraan Pelayanan Gizi 3. Pengorganisasian Pelayanan Gizi 4. Pencatatan dan Pelaporan 5. Pembinaan dan Pengawasan	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
32	RPermenkes tentang Penyelenggara Mutu di Rumah Sakit	1. Pengaturan tentang penyelenggara mutu di Rumah Sakit 2. Mengatur tentang pembentukan, tugas dan kewenangan penyelenggara Mutu	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	
33	RPermenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai. 2. Pelayanan Farmasi Klinik. 3. Sumber Daya Kefarmasian. 4. Pengorganisasian. 5. Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
34	RPermenkes tentang Izin Khusus Produksi dan Izin Khusus Penggunaan Narkotika	1. Penyelenggaraan izin khusus produksi narkotika dan izin khusus penggunaan narkotika. 2. Tata cara pemberian izin khusus produksi dan izin khusus penggunaan narkotika. 3. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
35	RPermenkes Perubahan atas Permenkes Nomor 76	1. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Media Habis Pakai.	Direktorat Jenderal	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	2. Kegiatan pelayanan farmasi klinik. 3. Sumber Daya Manusia 4. Sarana dan Prasarana	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
36	RPermenkes tentang tentang Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik	1. Persyaratan PSEF 2. Sistem elektronik farmasi 3. Penyelenggaraan E-Farmasi 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
37	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan Obat	1. Daftar perubahan penggolongan obat 2. Pembatasan untuk penggolongan obat 3. Waktu peralihan terkait penyesuaian terhadap penggolongan obat yang baru	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Mencabut Kepmenkes No. 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, Kepmenkes No. 1527/MENKES/SK/XII/1997 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 2, dan Kepmenkes No. 1175/MENKES/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 3

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
38	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika	Perubahan atas daftar psikotropika yang tercantum dalam lampiran Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Permenkes Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Mencabut Permenkes Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
39	RPermenkes tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Tahapan Pembangunan 2. Syarat dan Mekanisme Penetapan 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Evaluasi dan Pelaporan 5. Mekanisme Pemberian Penghargaan	Inspektorat Jenderal	Amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dan Peraturan Presiden no 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
40	RPermenkes tentang Riset Kesehatan Nasional	1. Jenis Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) 2. Penyelenggaraan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Pengolahan, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) 4. Koordinasi dan kerja sama 5. Pembinaan 6. Pembiayaan		
41	RPermenkes tentang Tata Cara Proses Evaluasi Kompetensi Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	1. Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Melalui Adaptasi Lapangan 2. Persyaratan Evaluasi Kompetensi Melalui Adaptasi Lapangan 3. Pendanaan 4. Pembinaan dan Pengawasan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1. Amanah Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2. Amanah Pasal 524 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 3. Amanah Pasal 32 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				4. Permenkes Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
42	RPermenkes tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	1. Penyelenggaraan bakti sosial oleh tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) dalam pelayanan kesehatan 2. Seminar yang diselenggarakan oleh TKWNA 3. TKWNA sebagai Relawan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
43	RPermenkes tentang Program Afirmasi Pendidikan Kesehatan	1. Persyaratan penerima program 2. Prosedur pelaksanaan program 3. Institusi penyelenggara program 4. Pembiayaan program 5. Pengelolaan program 6. Pembinaan dan Pengawasan program	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	
44	RPermenkes tentang Penyelenggaraan	1. Perencanaan pelatihan 2. Penyelenggaraan pelatihan	Badan Pengembangan	Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui Pelatihan	3. Evaluasi pelatihan bidang kesehatan di indonesia	dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002